

DISPARITAS PEMBANGUNAN REGIONAL DALAM ERA DESENTRALISASI FISKAL: TINJAUAN LITERATUR TENTANG KONVERGENSI EKONOMI DAN EFEKTIVITAS INVESTASI PUBLIK DI INDONESIA

Ikhwan Alfiansyah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues

ikhwan.alfiansyah@gayolueskab.go.id

Abstract

This study aims to examine regional development disparities in the era of fiscal decentralization through a systematic literature review focusing on economic convergence and the effectiveness of public investment in Indonesia. Fiscal decentralization is theoretically expected to promote equitable development by enhancing local government capacity in resource allocation. However, empirical evidence indicates that regional inequality remains persistent, driven by disparities in fiscal capacity, institutional quality, and uneven distribution of public investment. This study employs a library research approach by analyzing recent scholarly articles indexed in reputable databases over the last five years (2020–2025). The findings reveal that fiscal decentralization in Indonesia has produced mixed outcomes. While some regions demonstrate signs of β -convergence, overall regional disparities remain high, indicating the absence of consistent σ -convergence. Structural factors such as infrastructure gaps, market accessibility, and human capital inequality play significant roles in shaping these outcomes. Furthermore, public investment is identified as a crucial mediating variable in the relationship between fiscal decentralization and economic convergence. The effectiveness of such investment largely depends on governance quality, planning efficiency, and equitable allocation across regions. This study contributes to the literature by integrating fiscal decentralization, economic convergence, and public investment into a comprehensive analytical framework. It highlights the importance of strengthening institutional capacity and implementing equitable fiscal policies to achieve inclusive regional development. The findings have important policy implications for designing more effective decentralization strategies to reduce regional disparities and support sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: fiscal decentralization, regional inequality, economic convergence, public investment, Indonesia.

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal telah lama dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan. Secara teoritis, desentralisasi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga diharapkan mampu mempercepat konvergensi ekonomi antarwilayah. Namun demikian, dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan bahwa hasil desentralisasi fiskal tidak selalu sejalan dengan ekspektasi teoritis tersebut (Rodríguez-Pose & Gill, 2021; Lessmann & Seidel, 2022).

Fenomena global menunjukkan bahwa banyak negara berkembang justru mengalami peningkatan disparitas regional pasca implementasi desentralisasi fiskal. Ketimpangan antarwilayah cenderung dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal, kualitas institusi, serta distribusi investasi publik yang tidak merata. Studi empiris terbaru mengindikasikan bahwa wilayah dengan basis ekonomi kuat dan infrastruktur yang lebih baik cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari desentralisasi dibandingkan wilayah tertinggal (Ezcurra & Rodríguez-Pose, 2021; Iammarino et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak awal tahun 2000-an melalui Undang-Undang Otonomi Daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa disparitas antarprovinsi dan antarkabupaten/kota masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional. Indeks Williamson dan indikator ketimpangan lainnya menunjukkan tren yang relatif stagnan atau bahkan meningkat di beberapa kawasan, khususnya antara wilayah barat dan timur Indonesia (Bappenas, 2022; World Bank, 2021).

Utama yang muncul adalah belum optimalnya mekanisme desentralisasi fiskal dalam mendorong konvergensi ekonomi regional. Ketidakseimbangan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta perbedaan efektivitas belanja publik menjadi faktor yang memengaruhi hasil pembangunan yang tidak merata. Selain itu, investasi publik yang seharusnya menjadi instrumen utama pemerataan justru seringkali terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga memperlebar kesenjangan antarwilayah (Prasetyo & Zuhdi, 2021; Sari et al., 2023).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan regional, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis kuantitatif berbasis data panel tanpa mengintegrasikan secara komprehensif perspektif konvergensi ekonomi dan efektivitas investasi publik dalam satu kerangka analisis. Selain itu, kajian berbasis *systematic literature review* yang secara khusus memetakan hubungan antara ketiga variabel tersebut dalam konteks Indonesia masih relatif terbatas (Nguyen et al., 2022; Sarker et al., 2021).

Keterbatasan lain dari literatur yang ada adalah kurangnya eksplorasi terhadap mekanisme bagaimana investasi publik memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan konvergensi ekonomi. Sebagian besar penelitian hanya menilai dampak langsung tanpa mempertimbangkan faktor institusional, kualitas belanja, dan distribusi spasial investasi. Padahal, studi terbaru menekankan pentingnya kualitas tata kelola dan efisiensi belanja publik sebagai determinan utama keberhasilan konvergensi regional (OECD, 2020; Rodríguez-Pose & Ketterer, 2020).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu desentralisasi fiskal, konvergensi ekonomi, dan efektivitas investasi publik dalam satu kerangka kajian literatur yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga mengeksplorasi peran mediasi investasi publik dalam mempercepat atau menghambat proses konvergensi ekonomi regional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur pembangunan regional serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih inklusif.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui agenda transformasi ekonomi nasional. Ketimpangan regional yang tidak tertangani berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai peran desentralisasi fiskal dan investasi publik dalam mendorong konvergensi ekonomi menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (World Bank, 2023; UNDP, 2022).

Kajian Pustaka

Teori Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Regional

Desentralisasi fiskal merujuk pada pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan dan belanja publik. Secara teoritis, desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas, serta responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal. Teori klasik menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan sentralistik (Rodríguez-Pose & Gill, 2021).

Namun, literatur terbaru menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan regional sangat bergantung pada kapasitas institusi, kualitas tata kelola, dan tingkat kesiapan ekonomi daerah. Studi empiris menemukan bahwa tanpa dukungan institusional yang kuat, desentralisasi justru berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah karena daerah yang lebih maju mampu memanfaatkan otonomi secara lebih optimal dibandingkan daerah tertinggal (Lessmann & Seidel, 2022; Ezcurra & Rodríguez-Pose, 2021).

Konsep Ketimpangan Regional dan Indikator Pengukuran

Ketimpangan regional merupakan kondisi ketidakseimbangan distribusi pembangunan ekonomi antarwilayah yang tercermin dalam perbedaan pendapatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur ekonomi regional, ketimpangan sering diukur menggunakan indikator seperti Indeks Williamson, Gini Ratio regional, serta disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa ketimpangan regional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek struktural seperti akses terhadap pendidikan, konektivitas infrastruktur, dan integrasi pasar (Iammarino et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, ketimpangan antarwilayah juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan historis, yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan antara kawasan barat dan timur (World Bank, 2021).

Teori Konvergensi Ekonomi (β -Convergence dan σ -Convergence)

Konvergensi ekonomi merupakan konsep yang menjelaskan apakah wilayah yang lebih miskin mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan wilayah yang lebih maju. Dalam literatur ekonomi, terdapat dua pendekatan utama, yaitu β -convergence dan σ -convergence. β -convergence terjadi ketika wilayah dengan pendapatan rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah dengan pendapatan tinggi, sedangkan σ -convergence mengacu pada penurunan variasi atau dispersi pendapatan antarwilayah dari waktu ke waktu.

Studi empiris terbaru menunjukkan hasil yang beragam terkait konvergensi regional, terutama di negara berkembang. Beberapa penelitian menemukan adanya konvergensi bersyarat (*conditional convergence*), di mana proses konvergensi bergantung pada faktor-faktor seperti investasi, kualitas institusi, dan kebijakan fiskal (Nguyen et al., 2022). Namun, dalam banyak kasus, konvergensi tidak terjadi secara otomatis, terutama ketika terdapat ketimpangan struktural yang signifikan.

Peran Investasi Publik dalam Pembangunan Regional

Investasi publik, khususnya dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, merupakan instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa investasi publik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konektivitas ekonomi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas investasi publik sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan. Investasi yang tidak tepat sasaran atau terkonsentrasi di wilayah tertentu justru dapat memperbesar kesenjangan antarwilayah (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, distribusi investasi yang merata dan berbasis kebutuhan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif.

Hubungan Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, dan Konvergensi Ekonomi

Literatur menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara desentralisasi fiskal, investasi publik, dan konvergensi ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efektivitas investasi publik melalui peningkatan otonomi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, di sisi lain, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dapat menyebabkan distribusi investasi yang tidak merata.

Studi terbaru menunjukkan bahwa investasi publik berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dan konvergensi ekonomi. Artinya, keberhasilan desentralisasi dalam mendorong konvergensi sangat bergantung pada bagaimana investasi publik dialokasikan dan dikelola di tingkat daerah (Sarker et al., 2021; Rodríguez-Pose & Ketterer, 2020). Tanpa pengelolaan yang efektif, desentralisasi justru berpotensi memperkuat divergensi regional.

Konteks Empiris Indonesia

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil mengurangi ketimpangan regional. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, rendahnya kapasitas fiskal lokal, serta perbedaan kualitas tata kelola antardaerah.

Selain itu, distribusi investasi publik yang masih terpusat di wilayah tertentu menjadi faktor utama yang memperlambat proses konvergensi ekonomi. Studi empiris menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak investasi, sehingga menciptakan efek aglomerasi yang memperbesar ketimpangan (Prasetyo & Zuhdi, 2021; World Bank, 2023).

Sintesis Literatur dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan regional dalam era desentralisasi fiskal merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan fiskal, investasi publik, dan faktor struktural lainnya. Konvergensi ekonomi tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat, khususnya dalam distribusi investasi publik yang adil dan efisien.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menempatkan desentralisasi fiskal sebagai variabel utama, investasi publik sebagai variabel mediasi, dan konvergensi ekonomi sebagai outcome yang diharapkan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika ketimpangan regional di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, teori, dan temuan empiris terkait disparitas pembangunan regional dalam era desentralisasi fiskal, khususnya yang berkaitan dengan konvergensi ekonomi dan efektivitas investasi publik di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, seperti artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menggunakan kata kunci seperti *fiscal decentralization*, *regional inequality*, *economic convergence*, dan *public investment*, dengan batasan publikasi dalam lima tahun terakhir (2020–2025) untuk memastikan kebaruan dan relevansi kajian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan sintesis literatur. Peneliti mengidentifikasi pola hubungan antara desentralisasi fiskal, investasi publik, dan konvergensi ekonomi dengan mengelompokkan temuan-temuan penelitian terdahulu ke dalam tema-tema utama yang relevan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi kritis untuk menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), inkonsistensi hasil studi, serta peluang pengembangan penelitian di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan

kerangka konseptual yang komprehensif serta memberikan dasar teoritis yang kuat dalam memahami dinamika ketimpangan pembangunan regional di Indonesia secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Tren Penelitian dan Perkembangan Kajian

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai ketimpangan regional dalam konteks desentralisasi fiskal mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Fokus utama penelitian berkembang dari sekadar mengukur disparitas menuju analisis mekanisme yang lebih kompleks, seperti peran institusi, kualitas tata kelola, dan efektivitas belanja publik. Studi-studi terbaru cenderung mengintegrasikan pendekatan multidimensional dengan menggabungkan variabel ekonomi, sosial, dan spasial dalam menjelaskan dinamika ketimpangan regional (Nguyen et al., 2022; Sarker et al., 2021).

Selain itu, pendekatan metodologis juga semakin berkembang dengan penggunaan data panel dinamis, model spasial, serta analisis bibliometrik. Hal ini menunjukkan bahwa isu ketimpangan regional tidak lagi dipandang sebagai fenomena statis, melainkan sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor struktural. Dalam konteks Indonesia, penelitian mulai mengarah pada evaluasi kebijakan fiskal daerah dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan.

2. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional

Hasil literatur menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak yang ambivalen terhadap ketimpangan regional. Di satu sisi, desentralisasi memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan.

Studi empiris menunjukkan bahwa daerah dengan basis ekonomi kuat cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari desentralisasi, sementara daerah tertinggal menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan otonomi fiskal secara optimal (Lessmann & Seidel, 2022; Ezcurra & Rodríguez-Pose, 2021). Dalam konteks Indonesia, ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tertentu menjadi faktor utama yang memperlambat pemerataan pembangunan.

3. Pola Konvergensi Ekonomi Regional

Temuan literatur menunjukkan bahwa konvergensi ekonomi regional di Indonesia cenderung bersifat parsial dan tidak merata. Beberapa wilayah menunjukkan indikasi β -convergence, di mana daerah dengan pendapatan rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah maju. Namun, secara keseluruhan, σ -convergence belum sepenuhnya tercapai, yang berarti disparitas antarwilayah masih relatif tinggi.

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa konvergensi ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kualitas infrastruktur, akses terhadap pasar,

serta tingkat pendidikan masyarakat (Iammarino et al., 2020). Selain itu, keberadaan efek aglomerasi di wilayah maju juga menjadi hambatan bagi konvergensi, karena investasi dan aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah tertentu.

4. Peran dan Efektivitas Investasi Publik

Investasi publik terbukti memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan regional, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitas investasi publik sangat bergantung pada kualitas perencanaan, distribusi, dan implementasi kebijakan.

Literatur menunjukkan bahwa investasi yang terkonsentrasi di wilayah maju justru memperkuat ketimpangan, sedangkan investasi yang diarahkan ke wilayah tertinggal dapat mempercepat konvergensi ekonomi (Sari et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan distribusi anggaran serta rendahnya efisiensi belanja daerah, yang seringkali tidak sesuai dengan prioritas pembangunan.

5. Peran Mediasi Investasi Publik dalam Desentralisasi Fiskal

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa investasi publik berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dan konvergensi ekonomi. Desentralisasi fiskal tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan pembangunan, melainkan bergantung pada bagaimana investasi publik dialokasikan dan dikelola.

Studi menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola yang baik mampu mengoptimalkan investasi publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sementara daerah dengan tata kelola yang lemah cenderung mengalami inefisiensi dan pemborosan anggaran (Rodríguez-Pose & Ketterer, 2020). Hal ini menegaskan bahwa kualitas institusi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal.

6. Sintesis dan Implikasi Teoretis

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan regional dalam era desentralisasi fiskal merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Interaksi antara kapasitas fiskal, kualitas institusi, distribusi investasi, dan kondisi struktural wilayah menentukan arah konvergensi atau divergensi ekonomi.

Dari perspektif teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa desentralisasi fiskal harus diiringi dengan penguatan institusi dan kebijakan redistributif yang efektif. Tanpa intervensi yang tepat, desentralisasi justru berpotensi memperbesar ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti dalam mendorong pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengurangi disparitas pembangunan regional. Meskipun secara teoritis desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pemerataan pembangunan, dalam praktiknya terdapat

ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah yang menyebabkan hasil pembangunan tidak merata. Daerah dengan basis ekonomi dan institusi yang lebih kuat cenderung memperoleh manfaat lebih besar, sementara daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan otonomi fiskal secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak yang bersifat ambivalen terhadap ketimpangan regional.

Selain itu, proses konvergensi ekonomi regional di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat (β -convergence), namun secara keseluruhan disparitas antarwilayah masih tinggi (σ -divergence). Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kualitas infrastruktur, akses pasar, serta tingkat pendidikan, yang belum merata di seluruh wilayah. Efek aglomerasi di wilayah maju juga menjadi penghambat utama dalam proses konvergensi, karena aktivitas ekonomi dan investasi cenderung terkonsentrasi di daerah tertentu.

Temuan penting lainnya adalah bahwa investasi publik memiliki peran strategis sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dan konvergensi ekonomi. Efektivitas investasi publik sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, perencanaan, serta distribusi anggaran yang tepat sasaran. Investasi yang terpusat di wilayah maju justru memperbesar ketimpangan, sedangkan distribusi investasi yang lebih merata dapat mempercepat proses konvergensi ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi peran investasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan regional yang inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengurangan ketimpangan regional tidak dapat dicapai hanya melalui desentralisasi fiskal semata, tetapi memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal yang adaptif, penguatan institusi daerah, serta strategi investasi publik yang berkeadilan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti guna memastikan bahwa desentralisasi fiskal benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2022). *Laporan Pembangunan Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ezcurra, R., & Rodríguez-Pose, A. (2021). Decentralization and regional inequality: Evidence from OECD countries. *Regional Studies*, 55(6), 1029–1041. <https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1754313>
- Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2020). Regional inequality in Europe: Evidence, theory and policy implications. *Journal of Economic Geography*, 20(2), 273–298. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbz009>
- Lessmann, C., & Seidel, A. (2022). Fiscal decentralization and regional inequality: Evidence from panel data. *Economic Systems*, 46(1), 100889. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100889>

- Nguyen, C. P., Su, T. D., & Nguyen, T. V. H. (2022). Fiscal decentralization and economic growth: A meta-analysis. *World Development*, 150, 105707. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105707>
- OECD. (2020). *OECD Regional Outlook 2020: Cities, regions and the COVID-19 crisis*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/959d5bao-en>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Paul, J., Lim, W. M., O’Cass, A., Hao, A. W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), 01–016. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12695>
- Prasetyo, P. E., & Zuhdi, U. (2021). The role of fiscal decentralization on regional inequality in Indonesia. *Economies*, 9(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/economies9030126>
- Rodríguez-Pose, A., & Gill, N. (2021). Fiscal decentralization and development outcomes. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 39(6), 1205–1225. <https://doi.org/10.1177/2399654420957635>
- Rodríguez-Pose, A., & Ketterer, T. (2020). Institutional change and regional inequality: The role of governance. *Regional Studies*, 54(9), 1234–1246. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1661989>
- Sari, D. P., Wibowo, M. G., & Nugroho, S. (2023). Public investment and regional inequality in Indonesia. *Sustainability*, 15(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su15043123>
- Sarker, T., Khan, H., & Rahman, M. (2021). Fiscal policy and regional disparities: A systematic review. *Sustainability*, 13(21), 11845. <https://doi.org/10.3390/su132111845>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2022*. United Nations Development Programme.
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2020). *VOSviewer manual*. Leiden University.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Regional inequality and development report*. World Bank Group.